



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2023





OUTLINE PAPARAN

- **PENDAHULUAN**
- **GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH**
- **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN**
- **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**
- **ARAH KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**
- **KINERJA PENYELENGGARA DAERAH**



1

PENDAHULUAN

- Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2018-2023
- Penyusunan RKPD 2023 disusun dalam kondisi pasca pandemik Covid 19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia. Kondisi ini telah berdampak pada capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 yang tentunya akan mempengaruhi penetapan target kinerja tahun 2023
- RKPD 2023 selain berpedoman pada RPJMD perubahan tahun 2018-2023 juga berpedoman pada RKP 2023, sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2023
- RPJPD 2005 – 2025 mengusung visi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 Yaitu :**“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”** dimana periode 2018 – 2023 merupakan periode pembangunan tahap ke-4, atau tahap akhir RPJPD 2005-2025
- Arah kebijakan periode keempat adalah : **Percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.**
- Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 yaitu : **Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal.**

DASAR HUKUM

1

UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

2

UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

3

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

4

PERMENDAGRINOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG
TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI
RAN PERDATENTANG RPJPD DAN RPJMD, SERTA TATA CARA
PERUBAHAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD

5

PERMENDAGRINOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
DAERAH

6

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2005-2025

7

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023



2

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH



PETA PROVINSI NTT

GEOGRAFI

Luas Wilayah	2.47.931,54 km ²
Pembagian Wilayah Administrasi	21 Kabupaten dan 1 kota
Letak Wilayah	118 ⁰ - 125 ⁰ BT
	8 ⁰ -12 ⁰ LS
Batas Wilayah	Utara : Laut Flores
	Timur : Timor Leste
	Selatan : Samudera Hindia dan Laut Timor
	Barat : Selat Sape
Panjang Pantai	: 200.000 km ²
Jumlah Pulau	: 1.192 pulau



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2021

Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			
			2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,24	-0,83 (<i>c to c</i>) – (pertumbuhan kumulatif)	3,10
2	Angka kemiskinan	%	21,03	20,62	21,21	20,44
3	Inflasi	%	3,07	0,67	0,61 (<i>y on y</i>)	1,67
4	IPM	poin	64,39	65,23	65,19	65,28
5	Usia Harapan Hidup	tahun	66,38	66,85	67,01	67,15
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,30	7,55	7,63	7,69
7	TPT	%	3,01	3,35	4,28	3,77
8	Indeks Gini	poin	0,351	0,356	0,356	0,339

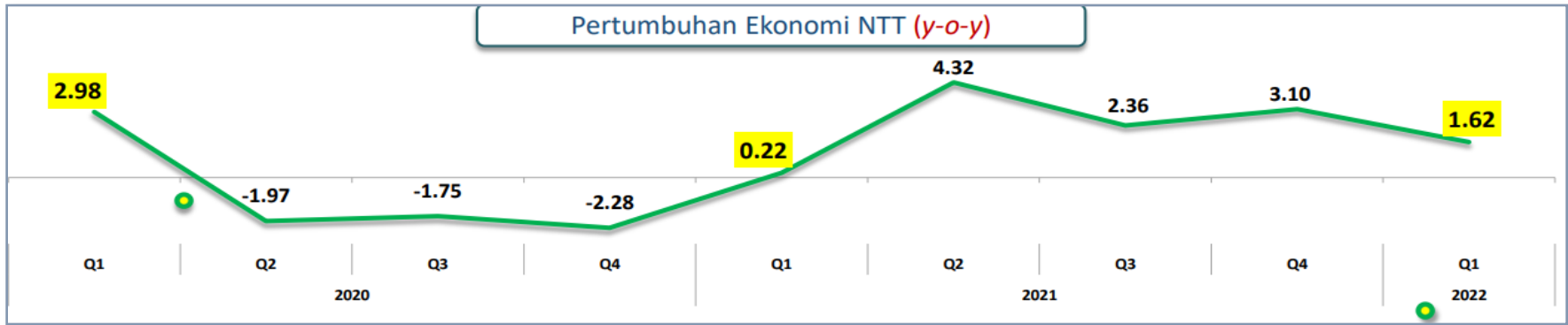


3

KEBIJAKAN EKONOMI DAN KERANGKA PENDANAAN



Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022



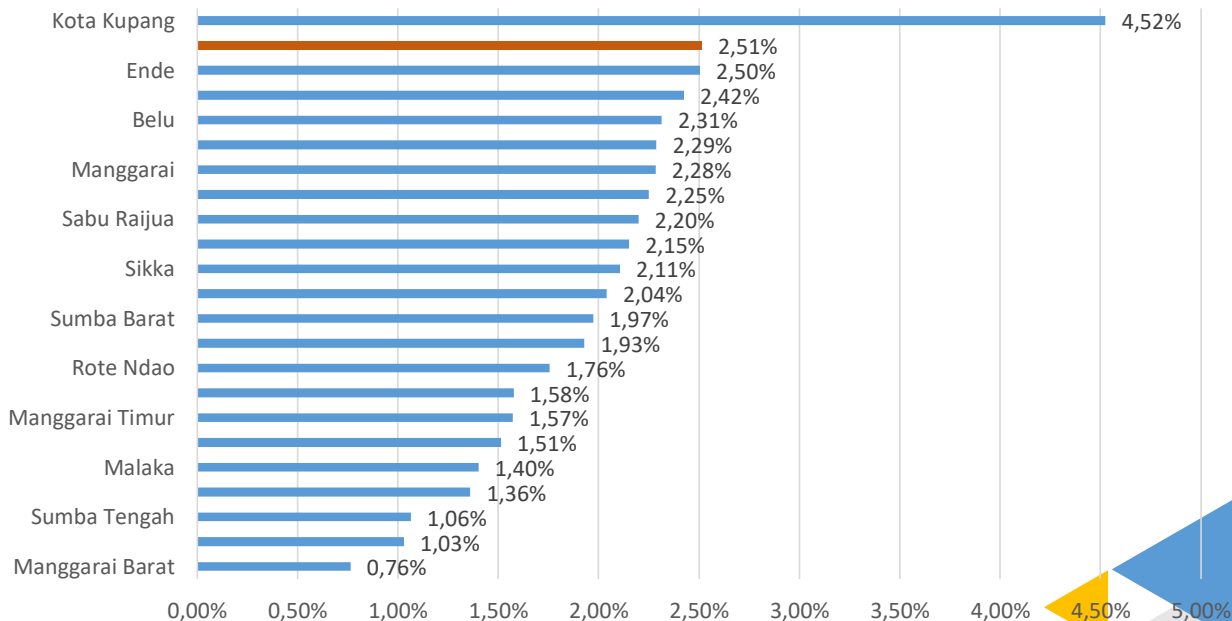
PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI KAB/KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 (c to c)

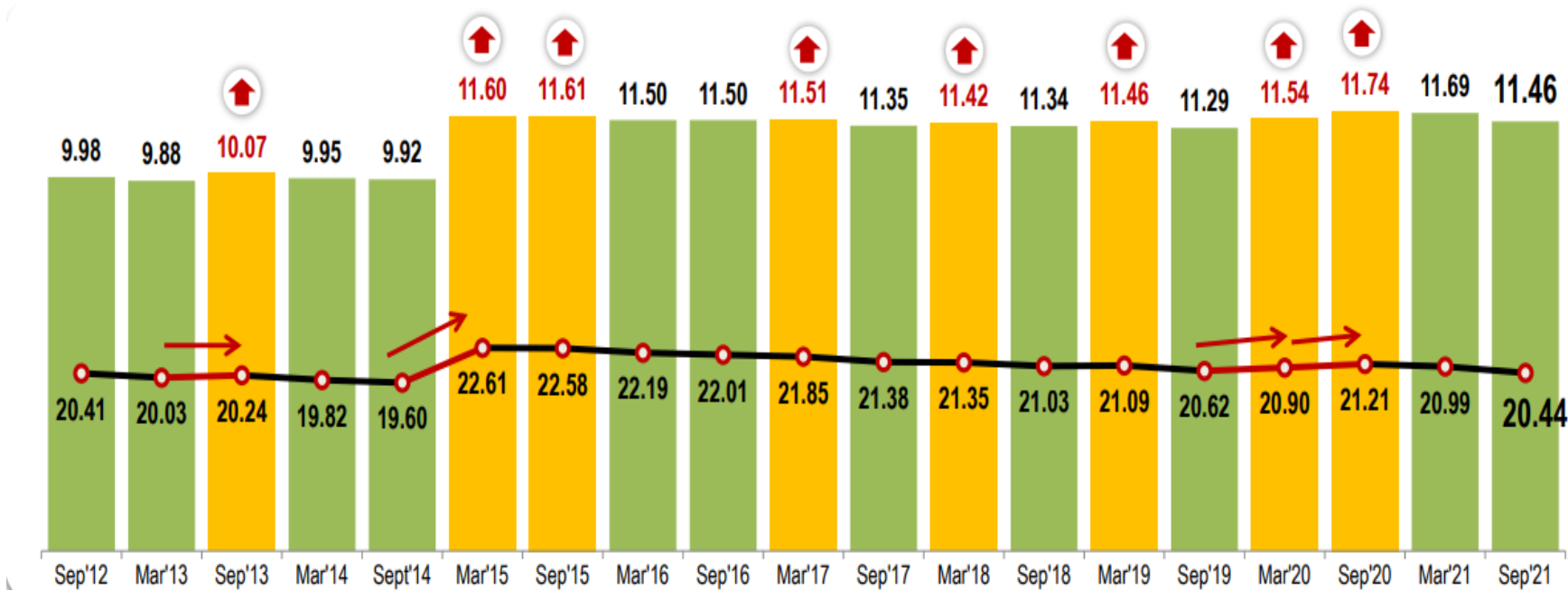
Ekonomi NTT pada tahun 2021

Seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur tumbuh positif pada tahun 2021 dengan pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Kota Kupang yang tumbuh sebesar 4,52%, diikuti Ende (2,50%), dan Sumba Timur (2,42%). sementara Kab. Manggarai Barat tercatat mengalami pertumbuhan terkecil (0,76%) diikuti Flores Timur (1,03%) dan Sumba Tengah (1,06%)

Ekonomi Nusa Tenggara Timur mulai tumbuh sebesar 2,51% pada tahun 2021 (c to c) setelah sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020



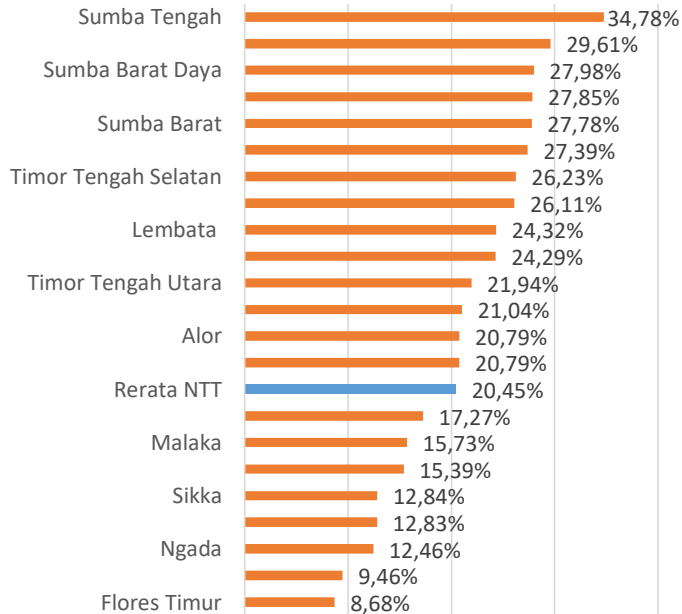
Perkembangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur September 2012 - September 2021



KEMISKINAN

SITUASI KEMISKINAN DI NTT

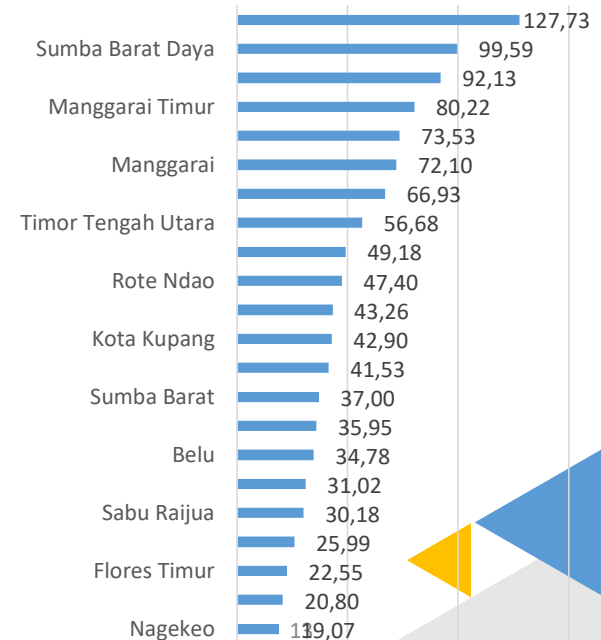
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
BERDASARKAN KAB/KOTA DI NTT TAHUN
2021 (%)



Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin NTT adalah sebesar 20,45% dengan total jumlah penduduk miskin mencapai 1.150,53 ribu jiwa. Kabupaten dengan Jumlah penduduk miskin terbesar di NTT pada tahun 2021 adalah TTS (127,72 ribu jiwa), Sumba Barat Daya (99,59 ribu jiwa) dan Kabupaten Kupang (92,13 ribu jiwa), sedangkan Nagekeo, Ngada dan Flores Timur tercatat memiliki penduduk miskin terkecil dengan jumlah masing-masing 19,07 ribu jiwa, 20,80 ribu jiwa dan 22,55 ribu jiwa

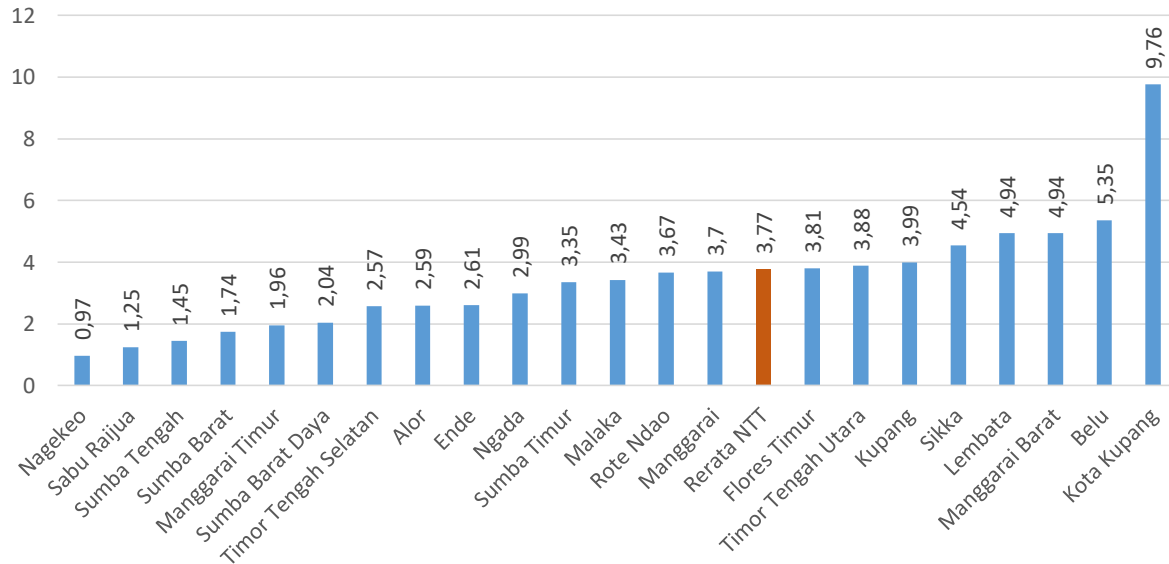
Sumba Tengah tercatat memiliki persentase penduduk miskin terbesar di tahun 2021 sebesar 34,78% diikuti sabu rajua (29,98%) dan sumba barat daya (27,98%), sementara Flores Tiimur, Kota Kupang dan Ngada tercatat memiliki persentase penduduk miskin terkecil pada tahun 2021 masing-masing sebesar 8,68%, 9,46% dan 12,46%.

JUMLAH PENDUDUK MISKIN
BERDASARKAN KAB/KOTA DI NTT
(RIBU JIWA) TAHUN 2021



PENGANGGURAN

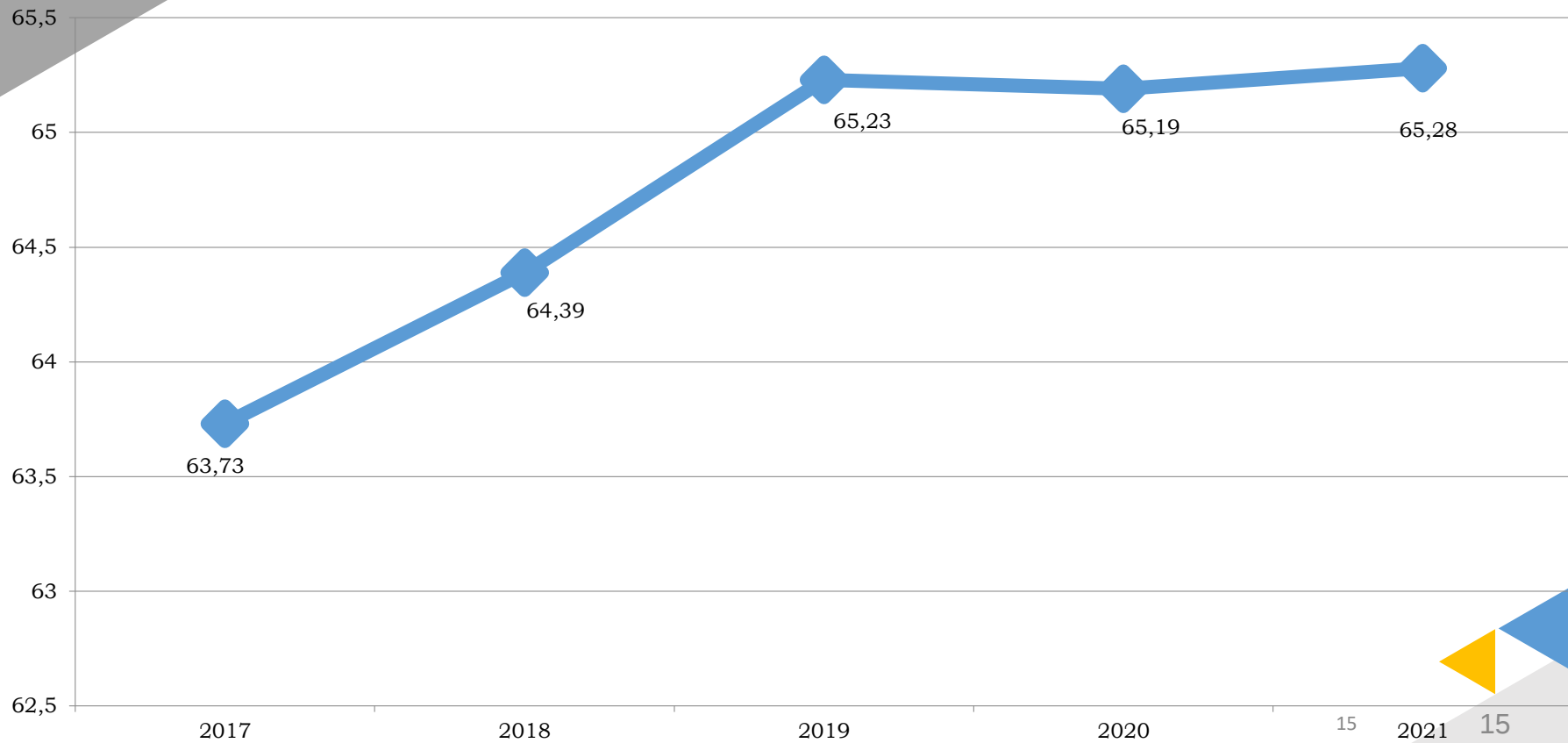
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PADA KAB/KOTA SE NTT
TAHUN 2021



TPT DI NTT

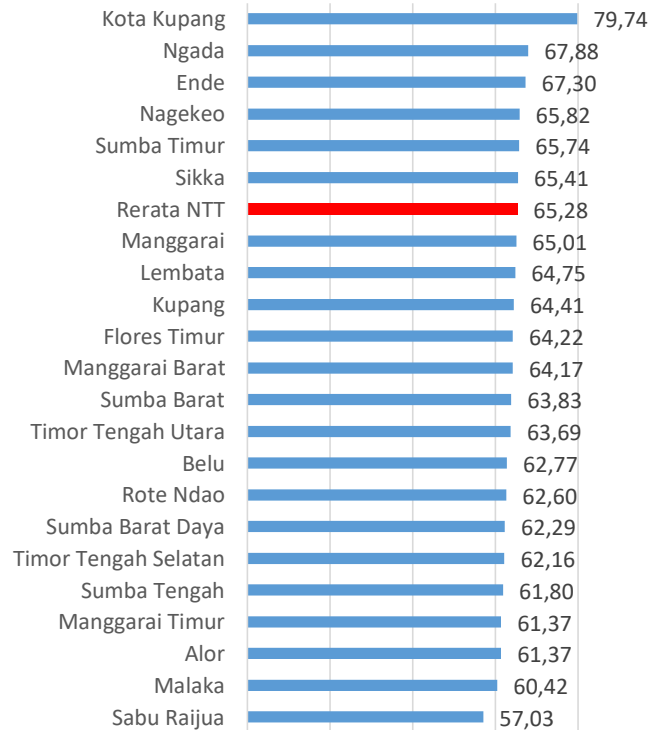
Pada tahun 2021 TPT NTT mencapai 3,77%, Kota Kupang tercatat memiliki TPT tertinggi sebesar 9,76 sementara Nagekeo memiliki TPT terendah sebesar 0,97%

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021



IPM

Indeks Pembangunan Manusia pada Kab/Kota di NTT tahun 2021



IPM DI NTT

Pada tahun 2021, IPM NTT tercatat sebesar 65,28%. 6 Kabupaten/kota menyandang skor yang lebih tinggi dari rerata NTT yaitu Kota Kupang, Ngada, Ende, Nagekeo, Sumba Timur dan Sikka, sementara kabupaten lainnya memiliki skor IPM yang lebih rendah dari rerata NTT. Sabu Raijua pada tahun 2021 merupakan Kabupaten dengan IPM terendah di NTT dengan besaran IPM mencapai 57,03

Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2018-2021

URAIAN	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	4.507.833.810.597	5.354.092.405.679	5.419.935.156.637	5.312.446.872.609
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.092.895.995.481	1.258.958.953.288	1.166.570.596.936	1.238.032.648.889
Pendapatan Pajak Daerah	866.157.779.773	908.207.117.663	924.189.837.048	925.862.559.388
Pendapatan Retribusi Daerah	27.570.244.733	60.831.986.435	34.959.171.078	69.890.857.732
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	72.415.455.930	70.662.452.308	65.135.467.630	64.982.172.050
Lain-lain PAD Yang Sah	126.752.515.045	219.257.396.882	142.286.121.181	177.297.059.718
PENDAPATAN TRANSFER	3.409.611.357.280	4.067.952.844.498	4.171.362.593.723	4.000.655.446.445
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.409.611.357.280	4.067.952.844.498	4.152.039.227.723	4.000.655.446.445
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			19.323.366.000	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.326.457.836	27.180.607.893	82.001.965.978	73.758.777.275
Pendapatan Hibah	5.326.457.836	27.180.607.893	82.001.965.978	73.758.777.275

Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pendapatan Daerah TA.2022 – 2024

KODE	URAIAN	2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
4.	PENDAPATAN	5.063.892.995.871	4.920.900.982.145	5.171.608.213.821
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.953.268.545	1.702.462.761.636	1.872.709.037.800
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.486.181.102.224	1.333.319.488.605	1.466.651.437.466
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	184.327.767.233	80.199.638.832	88.219.602.715
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.083.127.863	68.250.000.000	75.075.000.000
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	210.361.271.225	220.693.634.199	242.762.997.619
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.133.743.302.000	3.212.086.884.550	3.292.389.056.664
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.133.743.302.000	3.212.086.884.550	3.292.389.056.664
4.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	6.196.425.326	6.351.335.959	6.510.119.358
KODE	URAIAN	2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
	YANG SAH			
4.3.1.	Pendapatan Hibah	6.196.425.326	6.351.335.959	6.510.119.358

Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2021

KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021
5.	BELANJA	4.846.839.267.378	5.277.064.650.987	5.755.258.016.194	5.508.767.906.133
5.1.	BELANJA OPERASI	3.885.700.364.571	3.958.664.698.490	4.022.397.290.093	4.061.962.995.626
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.299.772.084.613	1.442.966.171.685	1.444.646.968.075	1.608.464.234.033
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	953.324.710.208	1.194.831.892.392	1.221.574.013.528	1.078.288.386.249
KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021
5.1.3.	Belanja Bunga			5.875.483.690	17.483.698.422
5.1.5.	Belanja Hibah	1.611.082.006.586	1.291.513.467.414	1.329.334.450.800	1.347.483.386.922
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	21.521.563.164	29.353.167.000	20.966.374.000	10.243.290.000
5.2.	BELANJA MODAL	529.761.034.603	798.224.255.845	1.026.785.278.415	903.257.622.800
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	852.255.000	30.000.000		147.952.000
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.493.090.879	116.636.579.503	202.160.307.478	185.901.613.833
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.802.530.521	139.208.422.686	177.836.474.130	135.344.543.385
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	252.448.197.953	472.361.496.339	504.964.198.116	572.412.496.697
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.164.960.250	69.987.757.317	141.824.298.691	9.451.016.885
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	125.185.304	1.490.608.760	240.938.915.874	135.775.036.685
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	125.185.304	1.490.608.760	240.938.915.874	135.775.036.685
5.4.	TRANSFER	431.252.682.900	518.685.087.892	465.136.531.812	407.772.251.022
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	427.541.748.500	515.982.681.892	460.136.531.812	397.772.251.022
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	3.710.934.400	2.702.406.000	5.000.000.000	10.000.000.000

Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 – 2024

KODE	URAIAN	Target 2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
5.	BELANJA	5.595.612.615.524	4.699.584.859.811	4.777.292.091.487
5.1.	BELANJA OPERASI	3.618.530.670.704	3.580.602.254.559	3.618.530.670.704
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.736.539.785.862	1.736.539.785.862	1.736.539.785.862
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.517.136.645.797	1.479.208.229.652	1.517.136.645.797
5.1.3.	Belanja Bunga	82.584.501.105	82.584.501.105	82.584.501.105
5.1.5.	Belanja Hibah	239.507.389.940	239.507.389.940	239.507.389.940
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	42.762.348.000	42.762.348.000	42.762.348.000
5.2.	BELANJA MODAL	1.324.558.691.975	428.420.483.245	468.199.298.776
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.502.962.647	34.955.796.293	34.955.796.293
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.663.982.540	145.997.986.905	145.997.986.905
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	989.516.835.788	247.379.208.947	287.158.024.478
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	874.911.000	87.491.100	87.491.100
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	32.355.619.337	32.355.619.337	32.355.619.337
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	32.355.619.337	32.355.619.337	32.355.619.337
5.4.	TRANSFER	620.167.633.508	658.206.502.670	658.206.502.670
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	602.238.993.608	640.277.862.770	640.277.862.770
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	17.928.639.900	17.928.639.900	17.928.639.900

Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2021

URAIAN	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN	277.894.564.023	205.602.009.250	403.706.217.941	258.865.991.151
Penerimaan Pembiayaan	277.894.564.023	216.350.973.250	430.706.217.941	503.023.089.715
Pengeluaran Pembiayaan	-	10.748.964.000	27.000.000.000	244.157.098.564
Pembiayaan Netto	277.894.564.023	205.602.009.250	403.706.217.941	258.865.991.151
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(61.110.892.757)	282.629.763.942	68.383.358.384	62.544.957.627

Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022-2024

KODE	URAIAN	2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	892.226.807.790	4.159.731.999	4.159.731.999
6.1.1.	Penggunaan SiLPA	135.237.297.415	-	-
6.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	752.829.778.376	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4.159.731.999	4.159.731.999
6.1.6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-		
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	360.507.188.157	225.475.854.333	398.475.854.333
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472	27.000.000.000	
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	41.020.555.352	41.020.555.352	41.020.555.352
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	198.475.854.333	198.475.854.333
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya			
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	531.719.619.633	(221.316.122.334)	(394.316.122.334)
6.Z.Z.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-



4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN



Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023

Tema RKP Tahun 2023

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan



Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem



Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan



Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*



Mendorong pemulihan dunia usaha



Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan



Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)



Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi



Pembangunan Ibu Kota Nusantara

ARAH KEBIJAKAN PROVINSI NTT



2019

TRANSFORMASI STRUKTUR DAN KULTUR DALAM PEMBANGUNAN

- Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Dasar
- Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintahan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
- Sinergitas tujuan dan prioritas pembangunan dengan Kabupaten/Kota serta pembaku kepentingan lainnya.
- Reformasi birokrasi system pemerintah.
- Pengembangan system pemerintahan berbasis elektronik.
- Keterbukaan Informasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2020

PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA SUMBER DAYA MANUSIA

- Pembangunan Ekonomi Pariwisata sebagai Penggerak Utama Pembangunan.
- Pencapaian dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan pembangunan berkaelanjutan.
- Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga.
- Pengembangan potensi garam sebagai industry nasional.
- Pengembangan badan usaha Daerah pada sektor-sektor potensial dalam peningkatan pendapatan daerah, pembukaan lapangan usaha baru dan peningkatan produk local.

2021

PERUBAHAN STRUKTUREKONOMI MENUJU PADA INDUSTRI DAN JASA BEBRASIS PERTANIAN

- Sinergitas tujuan pembangunan berkelanjutan lintas pemangku kepentingan
- Peningkatan Sumber Daya Air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih.
- Peningkatan industry pertanian, perikanan dan peternakan.
- Interkoneksi jaringan distribusi produk Daerah dan jaringan pariwisata *Ring of Beauty*.

2022

PENGEMBANGAN MATA RANTAI PARIWISATA

- Kebangkitan pembangunan menuju masyarakat sejahtera
- Kerjasama lintas Daerah dalam pengembangan produk local
- Pengembangan industry pariwisata dengan Provinsi lain dan luar negeri.

2023

KEMANDIRIAN LOKAL

- Kemandirian Masyarakat dalam pengelolaan Ekonomi berkelanjutan.
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Pembangunan industry pariwisata sebagai penggerak multi sektor.



TEMA & PRIORITAS DAERAH

TEMA : PEMULIHAN KESEHATAN DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN LOKAL

PRIORITAS DAERAH

Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat

1

PRIORITAS DAERAH

Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik

4

PRIORITAS DAERAH

Penguatan system kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif

2

PRIORITAS DAERAH

Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi

5

PRIORITAS DAERAH

Transformasi sector pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja

3

PRIORITAS DAERAH

Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana

6

TARGET PENCAPAIAN KINERJA MAKRO DAERAH TAHUN 2023



Indikator	Satuan	Rencana Jangka Menengah		Rencana Tahunan		Target Tahun 2024
		RPJMN 2020-2024 untuk Tahun 2022	RPJMD-P 2018-2023 untuk Tahun 2022	RKP 2023	RKPD 2023	
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,9	6,33 - 6,90	5.4-5.9	3.47-4.97	5,7 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	16,15	19,35 - 16,15	15.56-16.50	19.75-16.66	6,0 – 7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2,6	2,5 - 1,9	2.92-3.30	3.03	3,6 – 4,3
Kebutuhan Investasi	(Rp. Triliun)	71,47	71,47	-	80.94	-
Gini Rasio	Indeks	0,376 – 0,378	0,34 – 0,33	-	0.345	0,360 – 0,374
IPM	Nilai	73,44 – 73,48	67,35 – 69,00	-	65.73	75,54
Penurunan Emisi GRK (tCO ₂ ^{eq})	Persen	26,8 – 27,1	17.248.829	-	17.248.829	27,3

Target Pencapaian Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2023

Indikator	RKP 2023		Target PROVINSI NTT	
	WILAYAH NUSA TENGGERA	NUSA TENGGARA TIMUR	RPJMD-P TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1-5,7	5,4-5,9	6,7 - 7,3	3,4- 4,97
Tingkat Kemiskinan	14,8-13,8	16,50-15,56	15 - 12	19,75- 16,66
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,1-2,7	3,3-3,92	1,9 - 1,5	3,03
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	66,63-69,58	66,63-69,66	70 - 71	65,73
Rasio Gini (poin)	0,355-0,379	0,336-0,335	0,34 - 0,32	0,345
Inflasi (%)			3 - 3,2	3 - 3,2
Prevalensi Stunting (%)			12-10	12-10
PDRB Perkapita			25-27	25-27
Rasio Gini (poin)			0,34 - 0,32	0,32
Indeks Pembangunan Gender (poin)			95	95
Rasio PAD (%)			39,74	39,74
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)			17.248.829	17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)			80,94	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Poin)			71	71 ₂₈



Fokus kegiatan dan Usulan 2023 di kelompokkan menjadi :

- 1. Konektivitas Wilayah**
- 2. Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan**
- 3. Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata**
- 4. Peningkatan Kualitas hidup Manusia, termasuk didalamnya peningkatan prestasi olahraga**



5

**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA**

Prediksi dan Target Nilai Riil PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Tahun 2022-2023

Wilayah	Nilai Riil PDRB (Rp.Milyar)		Laju Pertumbuhan	
	Prediksi 2022	2023	Prediksi 2022	2023
Sumba Barat	1.540,06	1.582,40	6,93%	3,27%
Sumba Timur	4.259,99	4.389,50	6,63%	3,32%
Sumba Tengah	804,03	825,01	7,08%	3,19%
Sumba Barat Daya	2.464,49	2.528,78	7,08%	3,21%
Lembata	1.246,21	1.280,76	6,90%	3,27%
Flores Timur	3.759,23	3.838,63	7,60%	3,12%
Sikka	3.525,51	3.641,52	6,31%	3,21%
Nagekeo	1.471,52	1.506,11	7,34%	3,09%
Ende	4.367,97	4.511,13	6,38%	3,29%
Ngada	2.477,07	2.543,39	7,00%	3,29%
Manggarai Timur	2.191,87	2.241,57	7.43%	3.37%
Manggarai Barat	2.396,85	2.466,64	6,76%	3,21%
Manggarai	3.211,08	3.308,24	6.64%	3.32%
Alor	2.137,15	2.201,70	6.65%	3.20%
Sabu Raijua	841,32	865,13	6,84%	3,33%
Rote Ndao	2.063,39	2.126,34	6.62%	3.37%
Belu	3.205,28	3.291,01	7.01%	3.63%
Malaka	2.013,94	2.058,59	7,49%	3,35%
Timor Tengah Utara	3.084,94	3.177,19	6,68%	3,18%
Timor Tengah Selatan	5.070,76	5.220,41	6,72%	3,15%
Kupang	5.139,35	5.292,59	6,69%	3,29%
Kota Kupang	17.867,16	18.600,43	5,54%	4,11%
Nusa Tenggara Timur	75.137,14	77.497,06	6,52%	3,47%

Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2022-2023

Wilayah	2022 (%)	2023(%)
Sumba Barat	27.22	26.84
Sumba Timur	27.14	26.61
Sumba Tengah	34.66	34.74
Sumba Barat Daya	27.67	27.54
Lembata	23.88	23.60
Flores Timur	8.30	7.98
Sikka	12.45	12.13
Nagekeo	12.73	12.71
Ende	24.36	24.57
Ngada	12.29	12.19
Manggarai Timur	27.41	27.60
Manggarai Barat	16.71	16.26
Manggarai	20.50	20.34
Alor	20.31	19.95
Sabu Raijua	28.71	28.72
Rote Ndao	29.18	27.94
Belu	14.84	14.93
Malaka	15.33	15.03
Timor Tengah Utara	24.42	21.03
Timor Tengah Selatan	25.44	21.81
Kupang	19.54	18.27
Kota Kupang	9.36	9.32
Nusa Tenggara Timur	20.09	19.75

Arahan Penurunan TPT bagi Kab/Kota se-NTTTahun Rencana 2023

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023		
						Forecast	Lower CB	Upper CB	Forecast	Lower CB	Upper CB
Sumba Barat	3,83	4,06	3,15	3,96	1,74	2,97	2,16	3,78	1,82	1,01	2,64
Sumba Timur	2,90	1,42	2,13	3,49	3,35	2,91	0,93	4,89	2,82	0,61	5,03
Kupang	3,52	2,71	4,48	4,90	3,99	4,54	2,43	6,66	3,47	0,82	6,12
Timor Tengah Selatan	1,70	1,01	1,94	2,63	2,57	2,60	1,00	4,20	2,63	0,47	4,79
Timor Tengah Utara	0,60	0,85	1,22	4,26	3,88	3,20	0,68	5,73	3,17	0,34	5,99
Belu	2,47	5,26	7,19	7,42	5,35	6,64	4,30	8,97	8,49	6,15	10,83
Alor	1,86	4,09	3,03	3,11	2,59	3,57	1,85	5,30	3,50	1,72	5,28
Lembata	4,18	5,40	4,31	4,88	4,94	5,31	3,09	7,54	5,46	3,22	7,70
Flores Timur	5,45	4,01	3,09	3,16	3,81	2,75	0,29	5,20	2,60	0,07	5,13
Sikka	2,50	2,43	3,56	4,00	4,54	3,62	1,23	6,01	3,64	1,25	6,03
Ende	3,66	2,89	2,98	2,95	2,61	2,75	1,63	3,88	2,80	1,67	3,93
Ngada	3,23	2,11	3,38	4,69	2,99	4,75	2,31	7,19	6,16	3,70	8,62
Manggarai	4,09	3,21	3,11	4,09	3,70	4,39	2,48	6,29	4,56	2,64	6,48
Rote Ndao	2,52	2,11	2,73	4,90	3,67	3,00	0,34	5,66	2,88	0,14	5,62
Manggarai Barat	1,30	1,19	2,42	3,72	4,94	3,35	1,31	5,39	3,43	1,32	5,53
Sumba Tengah	4,26	3,57	3,43	4,02	1,45	2,80	1,20	4,39	2,27	0,67	3,86
Sumba Barat Daya	1,61	1,01	1,25	2,36	2,04	1,59	0,13	3,06	1,52	0,04	2,99
Nagekeo	3,60	1,88	2,76	3,09	0,97	2,51	1,28	3,74	2,94	1,67	4,21
Manggarai Timur	0,50	1,57	0,95	2,10	1,96	2,93	2,63	3,23	2,44	2,14	2,74
Sabu Raijua	2,75	2,12	2,89	3,08	1,25	1,51	0,28	2,74	1,27	0,04	2,50
Malaka	1,07	3,79	2,34	3,63	3,43	3,39	0,88	5,90	3,44	0,63	6,24
Kota Kupang	12,50	10,17	9,78	10,90	9,76	9,71	4,44	14,97	9,65	2,21	17,09
Nusa Tenggara Timur	3,27	3,01	3,35	4,28	3,77	3,10	1,86	4,33	3,03	1,79	4,28

**Target Capaian Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten/Kota
Se-Nusa Tenggara Timur Tahun
2021 dan 2022**

Wilayah	Target	
	2022	2023
Sumba Barat	64,09	64,35
Sumba Timur	66,69	67,26
Kupang	64,98	65,51
Timor Tengah Selatan	62,48	62,50
Timor Tengah Utara	63,88	64,00
Belu	62,92	63,00
Alor	62,36	62,93
Lembata	65,03	65,10
Flores Timur	65,73	66,42
Sikka	66,24	66,84
Ende	67,52	67,75
Ngada	68,61	69,17
Manggarai	66,10	66,80
Rote Ndao	63,74	64,50
Manggarai Barat	64,90	65,58
Sumba Tengah	62,27	62,74
Sumba Barat Daya	62,85	63,40
Nagekeo	67,02	67,57
Manggarai Timur	61,96	62,55
Sabu Raijua	57,59	58,10
Malaka	60,67	60,91
Kota Kupang	80,21	80,64
Nusa Tenggara Timur	65,6	65,73



6

**INTERVENSI RKPD PROVINSI NTT
TAHUN 2023**

Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Flores



Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Sumba, Sabu Raijua dan Rote Ndao





7

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI NTT 2021-2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan					
Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	5,87	6,33	6,7 – 7,3	6,7 – 7,3
Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3 – 3,2	3 – 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21 - 19,63	19,35 – 16,15	15 - 12	15 – 12
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	20 - 23	23 - 25	25 - 27	25 – 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	1,9 – 1,5
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,90	25,31	30,12	39,74	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95	95

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI NTT 2021-2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional <i>(Ring of Beauty)</i>					
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	4	6	8	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.534.144

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan					
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	9,08	45,60	74,81	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	75.02	76.74	78.46	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	15.498	9.238	9.238	47.948
Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	80	85	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	67	69	75	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	41,7	72,73	85,70	100	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	135

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia					
Angka Melek Huruf (%)	95,76	96,56	98,47	100	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	8,25	8,65	9,5	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	14,2	14,6	15	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,85	68,1	68,8	69	69
Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10 – 12	10 – 12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	60	70	80	80

Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	65	69	71	71
Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	B	A	A	A	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	44,41	50	60	75	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	75	85	90	90	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,32	82,40	82,50	83	83

PERSANDINGAN RPJMD-P TAHUN 2018-2023 DAN RANCANGAN RKPD TAHUN 2023 PEMERINTAH PROVINSI NTT

- ☐ ADA 193 PROGRAM YANG DALAM RPJMD-P 2018-2023 DAN RKPD 2023
- ☐ DARI ASPEK PENGANGGARAN TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM TIDAK ADA PENDANAANNYA DAN DISKENARIOKAN UNTUK DI KOLABORASIKAN DENGAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA



Persandingan P-RPJMD Tahun 2018-2023 dan Rancangan RKPD Tahun 2023
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
		NON URUSAN	2.573.424.163.776	37.775.052.678	-2.535.649.111.098	
	Semua Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.573.424.163.776	37.775.052.678	-2.535.649.111.098	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.261.774.144.699	3.441.161.606.091	179.387.461.392	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.026.963.335.327	1.867.111.570.319	-159.851.765.008	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	978.502.406.139	978.502.406.139	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.024.279.105.537	887.230.885.280	-1.137.048.220.257	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.021.160.000	1.168.776.500	147.616.500	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	850.515.500	0	-850.515.500	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	812.554.290	209.502.400	-603.051.890	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	268.397.951.105	569.671.712.740	301.273.761.635	
1	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	235.926.790.222	235.926.790.222	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	240.423.900.642,43	56.055.466.800	-184.368.433.842	
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	26.747.521.963	22.007.907.697	-4.739.614.266	
4	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	950.853.500	0	-950.853.500	
5	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	39.800.223.265	39.800.223.265	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
6	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	184.839.955.116	184.839.955.116	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD



3APPELITBANGDA
PROV. NTT

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
7	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	31.041.369.640	31.041.369.640	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
8	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	275.675.000	0	-275.675.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	880.867.229.016	897.553.437.960	16.686.208.944	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	56.935.497.161	56.935.497.161	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	230.552.413.581	221.038.746.174	-9.513.667.407	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.112.488.220	19.350.000.000	12.237.511.780	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	747.495.000	3.450.000.000	2.702.505.000	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	4.250.000.000	4.250.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.000.000.000	6.750.000.000	3.750.000.000	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	119.286.650.153	88.107.574.000	-31.179.076.153	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	964.067.445	3.510.000.164	2.545.932.719	
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	0	0	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	508.561.982.990,97	486.479.057.932	-22.082.925.059	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.392.588.789	745.274.820	-2.647.313.969	
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	7.249.542.837	6.937.287.709	-312.255.128	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	61.233.833.608	59.485.686.142	-1.748.147.466	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.250.000.000	6.457.208.900	4.207.208.900	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	44.735.271.907	40.307.582.192	-4.427.689.715	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	14.248.561.701	12.720.895.050	-1.527.666.651	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.781.185.606	29.121.956.838	25.340.771.232	
1	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	14.427.204.448	14.427.204.448	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.585.749.356	1.399.298.800	-2.186.450.556	
3	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	195.436.250	48.535.000	-146.901.250	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	7.641.701.800	7.641.701.800	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0	5.605.216.790	5.605.216.790	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.530.610.037	18.217.242.092	-2.313.367.945	
1	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
2	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.383.851.461	2.980.219.450	-1.403.632.011	
3	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	266.258.974	261.008.900	-5.250.074	
4	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.615.319.471	10.121.567.042	-1.493.752.429	
5	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.558.124.078	4.057.162.900	499.038.822	
6	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	627.890.720	713.283.800	85.393.080	
7	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	79.165.333	84.000.000	4.834.667	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	179.370.419.880	373.766.606.580	194.396.186.700	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	787.900.592	1.000.000.000	212.099.408	
1	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	341.731.657	0	-341.731.657	
2	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	209.810.028	600.000.000	390.189.972	
3	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	110.955.874	250.000.000	139.044.126	
4	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	125.403.033	150.000.000	24.596.967	



BAPPELTBANGDA
PROV. NTT



3APPELITBANGDA
PROV. NTT

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Transmigrasi					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.664.506.896	9.494.026.384	4.829.519.488	
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	7.310.655.725	7.310.655.725	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.921.191.353	307.780.140	-1.613.411.213	
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.072.452.696	782.989.599	-289.463.097	
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	506.010.146	233.592.410	-272.417.736	
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	195.772.674	124.695.060	-71.077.614	
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	871.022.552	431.882.500	-439.140.052	
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	98.057.475	302.430.950	204.373.475	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.899.092.801	1.773.455.840	-2.125.636.961	
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.417.060.566	1.184.937.760	-2.232.122.806	
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	135.674.583,04	206.419.680	70.745.097	
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	346.357.651,95	382.098.400	35.740.748	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	368.863.406	1.442.080.800	1.073.217.394	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	0	111.089.600	111.089.600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0	87.703.600	87.703.600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0	127.311.600	127.311.600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	0	994.489.400	994.489.400	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0	121.486.600	121.486.600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	368.863.406	0	-368.863.406	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.942.542.131	105.882.018.088	92.939.475.957	
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	99.186.989.216	99.186.989.216	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.083.129.502	576.452.600	-506.676.902	
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	35.000.000	35.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
4					0	
5		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.141.862.333	1.324.280.692	-817.581.641	
6		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	7.963.490.227	3.141.513.580	-4.821.976.647	
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	321.657.183	383.374.600	61.717.417	
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	564.693.511	104.666.000	-460.027.511	
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	289.104.046	174.664.300	-114.439.746	
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	578.605.329	955.077.100	376.471.771	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	664.891.980	2.418.201.000	1.753.309.020	



BAPPETBANGDA
PROV. NTT

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	664.891.980	2.418.201.000	1.753.309.020	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.750.855.080	91.237.713.746	50.486.858.666	
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	10.249.995.500	10.249.995.500	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	0	75.000.000	75.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	0	0	0	
4					0	
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.129.027.040	2.342.500.000	213.472.960	
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	38.621.828.040	78.570.218.246	39.948.390.206	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29.784.267.514	57.631.551.599	27.847.284.085	
1	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	18.583.008.912	18.583.008.912	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.667.820.456	4.590.588.653	922.768.197	
3	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	24.704.988.168	34.457.954.034	9.752.965.866	
4	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.411.458.890	0	-1.411.458.890	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.569.574.642	12.829.020.352	8.259.445.710	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	9.698.025.792	9.698.025.792	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.177.645.337	1.482.914.700	305.269.363	
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.391.929.305	1.648.079.860	-1.743.849.445	
4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.129.223.847	28.839.818.286	26.710.594.439	



BAPPEDITBANGDA
PROV. NTT

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	25.419.854.286	25.419.854.286	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
6	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0	2.255.674.000	2.255.674.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
7	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.129.223.847	1.164.290.000	-964.933.847	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.451.539.522	10.585.555.579	8.134.016.057	
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	9.339.336.088	9.339.336.088	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	477.729.396	175.000.000	-302.729.396	
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	624.211.565	195.000.000	-429.211.565	
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	830.607.516	576.219.491	-254.388.025	
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	358.298.711	150.000.000	-208.298.711	
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	160.692.334	150.000.000	-10.692.334	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	53.679.971.652	32.791.351.426	-20.888.620.226	
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	14.700.000.000	14.700.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.173.355.891	2.800.000.000	-373.355.891	
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	49.420.851.761	14.591.351.426	-34.829.500.335	
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.085.764.000	700.000.000	-385.764.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	108.482.373	400.000.000	291.517.627	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	108.482.373	400.000.000	291.517.627	



BAPPELITBANGDA
PROV. NTT

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	302.561.841	500.000.000	197.438.159	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	302.561.841	500.000.000	197.438.159	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	14.883.579.786	14.175.760.680	-707.819.106	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	3.401.792.030	3.401.792.030	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.156.988.367	1.762.997.750	-6.393.990.617	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.776.160.113	3.352.976.700	576.816.587	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	271.441.000	300.000.000	28.559.000	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.477.588.097	1.342.994.200	-1.134.593.897	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.201.402.209	4.015.000.000	2.813.597.791	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.579.857.755	1.893.052.800	-3.686.804.955	
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	5.579.857.755	1.823.052.800	-3.756.804.955	
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0	70.000.000	70.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.802.708.062	873.000.000	-929.708.062	
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.476.979.047	770.000.000	-706.979.047	
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	325.729.015	103.000.000	-222.729.015	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	229.062.613.013	297.893.791.401	68.831.178.388	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	56.782.533.854	55.183.354.884	-1.599.178.970	
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	21.863.831.610	21.863.831.610	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.913.302.843	1.340.000.000	-1.573.302.843	
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29.859.875.000	28.979.523.274	-880.351.726	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	18.372.652.563	855.000.000	-17.517.652.563	



3APPELITBANGDA
PROV. NTT

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.608.203.448	1.705.000.000	-2.903.203.448	
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.028.500.000	440.000.000	-588.500.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21.664.865.188	43.919.841.112	22.254.975.924	
1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	12.847.779.844	12.847.779.844	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.500.000.000	13.515.445.299	4.015.445.299	
3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.998.972.691	10.748.474.569	7.749.501.878	
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	6.248.182.400	3.843.312.200	-2.404.870.200	
5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.917.710.097	2.964.829.200	47.119.103	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	62.055.353.181	114.362.921.889	52.307.568.708	
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	43.467.677.384	43.467.677.384	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0	15.681.401.250	15.681.401.250	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.405.624.440	5.000.000.000	-405.624.440	
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.031.360.970	740.616.480	-290.744.490	
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.443.610.156	2.200.000.000	-1.243.610.156	
6	Dinas Peternakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	25.360.056.894	25.360.056.894	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
7	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	47.302.845.316	19.319.213.440	-27.983.631.876	
8	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	233.178.000	233.178.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD



BAPPETBANGDA
PROV. NTT

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
9	Dinas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.871.912.299	2.360.778.441	-2.511.133.858	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	61.506.334.281	21.554.201.933	-39.952.132.348	
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.891.993.376	18.707.175.473	-32.184.817.903	
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	9.108.559.656	926.758.620	-8.181.801.036	
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.379.440.176	1.485.267.840	105.827.664	
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	126.341.073	435.000.000	308.658.927	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.131.074.409	20.742.824.351	15.611.749.942	
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	14.766.566.701	14.766.566.701	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.638.364.891	1.443.762.710	-194.602.181	
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	677.616.948	519.854.580	-157.762.368	
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.534.574.821	1.994.172.460	459.597.639	
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.280.517.749	2.018.467.900	737.950.151	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.815.891.811	14.944.143.640	5.128.251.829	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	211.435.112	449.357.600	237.922.488	
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	287.082.516	0	-287.082.516	
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.290.320.114	1.078.296.440	-212.023.674	
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	848.202.963	899.195.300	50.992.337	
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.219.860.981	1.683.698.500	-1.536.162.481	
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.958.990.125	10.833.595.800	6.874.605.675	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11.563.679.388	26.186.503.592	14.622.824.204	



BAPPETITBANGDA
PROV. NTT

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	12.955.614.882	12.955.614.882	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	11.017.608.955	12.831.797.970	1.814.189.015	
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	326.750.513	89.325.740	-237.424.773	
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	219.319.920	309.765.000	90.445.080	
5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	542.880.901	1.000.000.000	457.119.099	
6	Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	62.200.933	225.000.000	162.799.067	
7	Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	289.884.167	300.000.000	10.115.833	
8	Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	190.795.801	475.000.000	284.204.199	
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	247.217.368.972	298.304.014.682	51.086.645.710	
		SEKRETARIAT DAERAH	168.723.220.975	128.042.930.346	-40.680.290.629	
1	Biro Umum	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	143.303.498.014	102.766.146.076	-40.537.351.938	
2	Biro Administrasi Pimpinan	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	0	0	0	
3	Biro Hukum	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
4	Biro Hukum	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.543.199.068	1.336.802.700	-2.206.396.368	
5	Biro Organisasi	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		0	0	
6	Biro Organisasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.402.714.747	1.340.199.720	-3.062.515.027	
7	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
8	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.308.594.926	1.076.503.000	-1.232.091.926	
9	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.505.603.684	13.046.546.100	6.540.942.416	
10	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
11	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.855.122.918	925.899.724	-929.223.194	



BAPPEDITBANGDA
PROV. NTT

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
12	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	32.572.486	600.472.326	567.899.840	
13	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.771.915.132	6.950.360.700	178.445.568	
		SEKRETARIAT DPRD	78.494.147.997	170.261.084.336	91.766.936.339	
1	Sekretariat DPRD	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	0	92.253.142.126	92.253.142.126	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	78.494.147.997	78.007.942.210	-486.205.787	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	985.173.730.015	1.106.158.179.960	120.984.449.945	
		PERENCANAAN	11.242.677.348	27.750.131.539	16.507.454.191	
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	17.407.332.601	17.407.332.601	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.646.667.551	2.737.238.638	-909.428.913	
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.596.009.797	7.605.560.300	9.550.503	
		KEUANGAN	898.123.311.051	995.861.972.487	97.738.661.436	
1	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	17.883.951.520	17.883.951.520	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	846.128.806.654	857.826.055.981	11.697.249.327	
3	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0	1.200.000.000	1.200.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
4	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	94.155.964.986	94.155.964.986	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
5	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.209.239.129	4.381.000.000	-1.828.239.129	



BAPPETITBANGDA
PROV. NTT

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
6	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	45.785.265.268	20.415.000.000	-25.370.265.268	
		KEPEGAWAIAN	10.581.622.617	14.674.381.084	4.092.758.467	
1	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	11.181.521.384	11.181.521.384	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	10.581.622.617	3.492.859.700	-7.088.762.917	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	51.965.003.999	49.735.470.294	-2.229.533.705	
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	17.079.202.324	17.079.202.324	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	51.965.003.999	32.656.267.970	-19.308.736.029	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.400.306.077	2.116.530.314	-1.283.775.763	
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.400.306.077	2.116.530.314	-1.283.775.763	
		PENGLOLAAN PERBATASAN	4.327.778.302	7.322.844.242	2.995.065.940	
1	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	6.517.844.642	6.517.844.642	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	4.327.778.302	804.999.600	-3.522.778.702	
		PENGHUBUNG	5.533.030.621	8.696.850.000	3.163.819.379	
1	Badan Penghubung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	7.955.485.000	7.955.485.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.533.030.621	741.365.000	-4.791.665.621	
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	18.349.240.381	19.088.366.757	739.126.376	
		INSPEKTORAT DAERAH	18.349.240.381	19.088.366.757	739.126.376	
1	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	12.990.874.556	12.990.874.556	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD



BAPPELTBANGDA
PROV. NTT

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	14.292.025.608	4.946.003.501	-9.346.022.107	
3	Inspektorat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.057.214.773	1.151.488.700	-2.905.726.073	
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.821.997.346	16.939.298.134	12.117.300.788	
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.821.997.346	16.939.298.134	12.117.300.788	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	6.971.976.284	6.971.976.284	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	297.530.421	400.000.000	102.469.579	
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.594.185.004	3.242.430.050	-351.754.954	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	189.889.092	140.234.700	-49.654.392	
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	148.975.767	401.291.700	252.315.933	
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	591.417.062	5.783.365.400	5.191.948.338	
	Total Pagu Urusan		4.925.769.514.306	5.553.311.863.605	627.542.349.299	
	Total Pagu Urusan dan Non Urusan		7.499.193.678.082	5.591.086.916.283	-1.908.106.761.799	



BAPPETBANGDA
PROV. NTT

TERIMA KASIH